

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Wajib menyusun (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 periode (satu) tahun yang membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam tataran implementasi amanat tersebut, hal ini merupakan kewajiban bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan terjemah dari perencanaan tahunan di urusan kesatuan bangsa dan politik, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan kondusifitas wilayah dan pendidikan politik masyarakat. Kebijakan perencanaan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan menuju Jawa Tengah yang aman dan sejahtera.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah diawali dengan persiapan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, orientasi mengenai Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan

penyusunan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan tahap penyajian rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang merupakan wadah penampung dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Penetapan rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tahun 2020.

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Resntra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2020.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | |
| 05 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | 0001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya; | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0002 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Biaya listrik, telepon dan air | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0005 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah | Jaminan barang bangunan gedung dan sarpras kantor | 5 | 4 | | 1 | 1 | 100,00 | 5 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0007 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan alat tulis kantor | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0008 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cetak kop surat, blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0009 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penerangan dan penyediaan komponen instalasi listrik | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 01 | 0011 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga dan bahan kebersihan, | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|-----------------|--|---|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 05 01 01 0012 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peraturan perundang-undangan, majalah, dan surat kabar | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 01 0014 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan minum harian dan rapat | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 01 0015 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah | Failitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 01 0016 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Tunjangan pengelola kegiatan, honorarium bulanan dan harlep | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 0 | | | | | | | | |
| 05 01 02 0002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 30 | 10 | | 2 | 2 | 100,00 | 12 | | | |
| 05 01 02 0006 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 02 0009 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan dan service kendaraan dinas | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |
| 05 01 02 0011 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Pemeliharaan barang-barang meubelair kantor | 60 | 48 | | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | | |
|-----------|---|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 05 | 01 | 02 | 0014 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Service dan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga | 60 | 48 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 02 | 0015 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi | Pemeliharaan peralatan komunikasi | 60 | 48 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 02 | 0023 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal | Penyediaan sarpras kantor | 60 | 48 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | 0 | | | | | | |
| 05 | 01 | 03 | 0001 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya | 560 | 410 | 0 | 0 | | 410 | | |
| 05 | 01 | 04 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | 0 | | | | | | |
| 05 | 01 | 04 | 0001 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bintek, workshop | 60 | 48 | 12 | 12 | 100,00 | 60 | | |
| 05 | 01 | 04 | 0002 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Sosialisasi peraturan bidang Kesbangpol | 400 | 320 | 80 | 80 | 100,00 | 400 | | |
| 05 | 01 | 04 | 0004 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia | Pembinaan aparat Kesbangpol | 750 | 780 | 240 | 240 | 100,00 | 1020 | | |
| | | | | Program Pendidikan Non Formal dan Informal | | | 0 | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|-----------|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 23 | | Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Masyarakat | 5150 | 4345 | | 0 | 0 | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | 0005 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | 0005 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol | Jumlah Kunjungan VIP/VVIP | 180 | 158 | | 40 | 39 | 97,50 | 197 |
| 01 | 05 | 01 | 0007 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan FGD Analisis | 2200 | 2100 | | 620 | 620 | 100,00 | 2720 |
| 01 | 05 | 01 | 0015 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan | Jumlah masyarakat yang mengikuti Rakor Perbatasan | 2600 | 1910 | | 400 | 400 | 100,00 | 2310 |
| 01 | 05 | 01 | 0021 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat | Jumlah masyarakat yang ikut pendidikan Demokratisasi dan HAM | 500 | 520 | | 200 | 200 | 100,00 | 720 |
| 01 | 05 | 01 | 0030 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN | Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi P4GN | 700 | 1690 | | 880 | 880 | 100,00 | 2570 |
| 01 | 05 | 01 | 0032 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / | Jumlah masyarakat yang terlibat | 1700 | 1600 | | 210 | 210 | 100,00 | 1810 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|-----------|---|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | sosialisasi PKS | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | 0034 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman ketahanan ekonomi | 2200 | 1760 | | | | | |
| | | | | | | 490 | 490 | 100,00 | 2250 | | | |
| 01 | 05 | 01 | 0035 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini | Jumlah masyarakat yang paham tentang deteksi dini | 4000 | 2500 | | | | | |
| | | | | | | 800 | 800 | 100,00 | 3300 | | | |
| 01 | 05 | 03 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 0 | | | | | |
| 01 | 05 | 03 | 0001 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara | 1050 | 985 | | | | | |
| | | | | | | 745 | 745 | 100,00 | 1730 | | | |
| 01 | 05 | 03 | 0002 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara | Peningkatan masyarakat yang paham ideologi negara | 2850 | 2635 | | | | | |
| | | | | | | 670 | 670 | 100,00 | 3305 | | | |
| 01 | 05 | 03 | 0005 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah | Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan dipelihara | 25 | 24 | | | | | |
| | | | | | | 7 | 7 | 100,00 | 31 | | | |
| 01 | 05 | 03 | 0006 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam harmonisasi dan kerukunan umat beragama | 1000 | 1680 | | | | | |
| | | | | | | 980 | 980 | 100,00 | 2660 | | | |
| 01 | 05 | 03 | 0007 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam solidaritas dan kesatupaduan | 1850 | 1800 | | | | | |
| | | | | | | 420 | 420 | 100,00 | 2220 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|-----------------|--|---|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 01 05 03 0010 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis | Jumlah masyarakat yang paham tentang mediasi konflik | 2100 | 1905 | | 560 | 560 | 100,00 | 2465 | | | |
| 01 05 03 0014 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik | Jumlah pelajar yang paham nilai-nilai pancasila | 2250 | 1630 | | 405 | 405 | 100,00 | 2035 | | | |
| 01 05 03 0017 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan | Jumlah masyarakat yang paham tentang pilar kebangsaan | 650 | 770 | | 405 | 405 | 100,00 | 1175 | | | |
| 01 05 03 0018 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan | Jumlah masyarakat yang terfasilitasi PPWK | 2475 | 2055 | | 650 | 650 | 100,00 | 2705 | | | |
| 01 05 04 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 0 | | | | | | | | |
| 01 05 04 0001 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah | Jumlah masyarakat yang paham nilai-nilai kebangsaan | 2100 | 1920 | | 480 | 480 | 100,00 | 2400 | | | |
| 01 05 04 0004 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pendayagunaan ormas | 850 | 1790 | | 630 | 630 | 100,00 | 2420 | | | |
| 01 05 04 0007 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi | Jumlah pelajar yang paham etika dan budaya politik | 3200 | 2700 | | 680 | 680 | 100,00 | 3380 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | | | |
|-----------|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | |
| | Negara Bagi Pemuda dan Pelajar | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 05 | | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 05 | 0006 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat | Jumlah konflik yang tertangani | 1970 | 1746 | | 268 | 268 | 100,00 | 2014 | | |
| 01 | 05 | 06 | | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat | | | 0 | | | | | | | |
| 01 | 05 | 06 | 0001 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga | Jumlah masyarakat yang paham tentang peran politik | 1125 | 1320 | | 660 | 660 | 100,00 | 1980 | | |
| 01 | 05 | 06 | 0003 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam penguatan dan sistem implementasi kelembagaan politik pemerintah | 2250 | 2085 | | 3280 | 3280 | 100,00 | 5365 | | |
| 01 | 05 | 06 | 0006 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi /Pemilu Pilkada | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam penguatan dan sistem implementasi pemilu/Pilkada | 1000 | 1450 | | 480 | 480 | 100,00 | 1930 | | |
| 01 | 05 | 06 | 0007 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi budaya etika politik | 1800 | 1610 | | 775 | 775 | 100,00 | 2385 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|---------------|---|---|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 01 05 06 0008 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada | Jumlah Kab/Kota yang tertangani terkait dampak pemilu/pilkada | 175 | 140 | | 35 | 35 | 100,00 | 175 | | | |
| 01 05 06 0009 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah | Jumlah Kab/kota yang terdata jumlah parpol | 175 | 140 | | 35 | 35 | 100,00 | 175 | | | |
| 01 05 06 0019 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pendidikan politik | 3000 | 3100 | | 600 | 600 | 100,00 | 3700 | | | |
| 01 05 06 0020 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat | Jumlah masyarakat yang paham dalam komunikasi politik | 3100 | 2235 | | 440 | 440 | 100,00 | 2675 | | | |
| 01 05 06 0025 | Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pendidikan politik | 3200 | 2815 | | 1600 | 1600 | 100,00 | 4415 | | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | 0 | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas | Sinkronisasi Kesbangpol dan linmas | 800 | 480 | | | | | | | | |
| | J U M L A H | | | | 0 | | | 99,95 | | | | |
| 0 00 01 | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|-------------|---|---|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0 00 01 001 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah (jenis) | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 00 01 002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 00 01 003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah. | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 00 01 004 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah. | | | | | | | | 12 | 0 | - |
| 0 00 01 005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan pelayanan perkantoran perangkat daerah. | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 00 01 006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah. | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 00 01 007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan, | | | | | | | | 12 | 3 | 5,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | minum rapat perangkat daerah. | | | | | | | | | | |
| 0 | 00 | 01 | 008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan / Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah. | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 | 00 | 01 | 009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor / Kendaraan Dinas / Operasional Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan / rumah dinas / gedung kantor / kendaraan dinas / operasional perangkat daerah. | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 | 00 | 01 | 010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin / berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah. | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 | 00 | 01 | 011 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. | | | | | 1 | 0 | - |
| 0 | 00 | 01 | 013 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan. | | | | | 0 | 0 | - |
| 0 | 00 | 01 | 014 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan. | | | | | 0 | 0 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0 | 00 | 01 | 015 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti diklat / workshop / bintek / seminar. | | | | | 240 | 0 | - |
| 0 | 00 | 01 | 016 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah. | | | | | 1 | 0 | - |
| 0 | 00 | 01 | 023 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | | | | | 12 | 3 | 5,00 |
| 0 | 00 | 02 | | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | | | | | | | |
| 0 | 00 | 02 | 001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun. | | | | | 10 | 3 | 6,00 |
| 0 | 00 | 02 | 002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah. | | | | | 10 | 3 | 6,00 |
| 0 | 00 | 02 | 004 | Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Kesbangpol | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan | | | | | 0 | 0 | - |
| | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa | | | | | 0 | 0 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| 1 | 05 | 15 | | Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan | Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial | | | | | | | |
| 1 | 05 | 15 | 001 | Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan konflik sosial | | | | | | 3 | 0 | - |
| | | | | Jumlah laporan konflik yang tertangani. | | | | | | 126 | 33 | 4,55 |
| | | | | Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. | | | | | | 280 | 280 | 12,84 |
| | | | | Jumlah Pemetaan/ Mapping Potensi Konflik Sosial | | | | | | 1 | 0 | - |
| 1 | 05 | 15 | 002 | Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani | | | | | | 8 | 2 | 2,27 |
| | | | | Jumlah Dukungan | | | | | | 1 | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|--|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Pengamanan Pemilu | | | | | | | | | | - |
| | | Jumlah Unjuk rasa tertangani | | | | | | | | 300 | 0 | - |
| | | Jumlah pantauan orang asing. | | | | | | | | 5200 | 1.200 | 3,97 |
| | | Jumlah laporan deteksi dini | | | | | | | | 12 | 0 | - |
| | | Jumlah Kader Resolusi Konflik Yang Terbentuk | | | | | | | | 1100 | 0 | - |
| 1 | 05 | 15 | 003 | Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila | | | | | | 600 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa | | | | | | 500 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk | | | | | | 150 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk | | | | | | 550 | 550 | 18,00 |
| | | | | Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk | | | | | | 250 | 80 | 3,76 |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Apel Kebangsaan | | | | | | 130000 | 0 | - |
| 1 | 05 | 15 | 004 | Perencanaan, Pengendalian dan | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan | | | | | | | | 1600 | 80 | 5,00 |
| | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila | | | | | | | | 300 | 300 | 100,00 |
| | | Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan | | | | | | | | 35 | 0 | - |
| 1 | 05 | 16 | | Program Penguatan Ketahanan Bangsa | Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Bangsa | | | | | | | |
| 1 | 05 | 16 | 001 | Penguatan Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi | | | | | | 105 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi | | | | | | 770 | 210 | 3,20 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | 0 | 0 | - |
| | | Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah | | | | | | | | 6 | 0 | - |
| 1 | 05 | 16 | 002 | Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah | | | | | | 49 | 4 | 1,52 |
| | | | | Jumlah Pembinaan Etnis dengan Negara | | | | | | 160 | 80 | 7,14 |
| | | | | Jumlah Pembinaan Dalam Rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya | | | | | | 160 | 80 | 3,70 |
| | | | | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis | | | | | | 160 | 0 | - |
| 1 | 05 | 16 | 003 | Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas. | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan | | | | | | | | 320 | 160 | 8,33 |
| | | Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi | | | | | | | | 160 | 160 | 14,29 |
| | | Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan | | | | | | | | 320 | 0 | - |
| 1 | 05 | 16 | 004 | Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Ketahanan Bangsa | | | | | | | | |
| | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | 500 | 0 | - |
| | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Masyarakat | | | | | | | | 440 | 220 | 50,00 |
| | | Jumlah Pengendalian | | | | | | | | 35 | 0 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Capaian Program Penguatan Ketahanan Bangsa | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 17 | | Program Penguatan Politik Dalam Negeri | Persentase masyarakat yang paham terhadap Aspek-Aspek IDI | | | | | | | |
| 1 | 05 | 17 | 001 | Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD'45 | | | | | | 1800 | 900 | 5,42 |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang ikut Sosialisasi Penanganan dampak Pemilu/Pilkada | | | | | | 210 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik | | | | | | 300 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Masyarakat Yang Ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada | | | | | | 400 | 200 | 8,06 |
| 1 | 05 | 17 | 002 | Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik | | | | | | 1300 | 640 | 3,83 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target Indikator Lainnya | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2013-2018 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019 | |
|------|---|---|---|--|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2018 | Realisasi Renja PD Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik | | | | | | | | 80 | 0 | - |
| | | Jumlah Fasilitasi Forkopimda | | | | | | | | 500 | 0 | - |
| | | Hasil Pendataan Parpol | | | | | | | | 35 | 0 | - |
| | | Jumlah Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol | | | | | | | | 400 | 0 | - |
| | | Jumlah Pengembangan Demokrasi diJateng | | | | | | | | 200 | 0 | - |
| 1 | 05 | 17 | 003 | Perencanaan, Pengendalian dan Pembinaan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi | | | | | | 400 | 0 | - |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Politik | | | | | | 1290 | 120 | 9,30 |
| | | | | Jumlah Pengendalian Capaian Program Penguatan Politik Dalam Negeri | | | | | | 35 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 berdasarkan LAKIP 2018 yang sudah disusun menetapkan sepuluh sasaran strategis, dua puluh empat indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2018 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 95,50%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

| No | Indikator | Target SPM | IKK | Target Renstra PD | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------------------------------|--|------------|-----|-------------------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| INDIKATOR TAHUN 2013-2018 | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat. | | | | | | | | | |
| | Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik ideologi politik dan wasbang | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Persentase jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik ideologi politik dan wawasan kebangsaan. | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Berkurangnya jumlah organisasi massa atau kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang bertujuan ingin mengganti ideologi Pancasila | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| 2 | Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | |
| | Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat. | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Meningkatnya pembauran antar etnis di Indonesia | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| 3 | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional. | | | | | | | | | |
| | Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial. | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Persentase Jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| 4 | Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional. | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Target SPM | IKK | Target Renstra PD | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----------|---|------------|-----|-------------------|-------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Terbentuknya dan optimalnya KOMINDA, FKUB, FPBI, di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah | | | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - |
| | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, FPWK, di Jawa Tengah | | | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - |
| | Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini. | | | 600 | 800 | 600 | 800 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah | | | 70,25 | 70,50 | 70,85 | 0 | - | - | - |
| | Turunnya praktek money politics | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik. | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pemilukada | | | 72,88 | 75 | 69,96 | 77,40 | - | - | - |
| | Meningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pilgub | | | - | 75 | - | 73,19 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik | | | | | | | | | |
| | Berkurangnya angka konflik politik dalam pemilu dan pemilukada | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Meningkatnya peran partai politik di daerah | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat. | | | 600 | 800 | 600 | 800 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa | | | | | | | | | |
| | Turunnya angka penyakit masyarakat seperti : kriminalitas, NAPZA, miras | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Berkurangnya angka konflik SARA, sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |

| No | Indikator | Target SPM | IKK | Target Renstra PD | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----------|--|------------|-----|-------------------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| 9 | Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| 10 | Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. | | | | | | | | | |
| | Terjalannya dengan berbagai pihak atau stakeholders terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik | | | 85 | 90 | 85 | 90 | - | - | - |
| | INDIKATOR TAHUN 2018-2023 | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa | | | | | | | | | |
| | Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa | | | - | - | - | - | 80 | 81 | - |
| 2 | Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik | | | | | | | | | |
| | Persentase masyarakat yang paham terhadap politik | | | - | - | - | - | 80 | 81 | - |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2020 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik.

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;

- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dala pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umar beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;

- e. Stabilitasnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Membuat Sekolah Politik Kebangsaan dengan menyasar para pemilih pemula dan anggota Rohis;
6. Memperkuat Portal Kebangsaan gunaantisipasi berita bohong dan hasutan (hate speech);
7. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
8. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
9. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
10. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
11. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
12. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
13. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
14. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
15. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----------|---|-------------|--|----------------|----------------------|---|-------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan | Jawa Tengah | Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial | 100% | 8.740.000.000 | Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan | Jawa Tengah | Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial | 100% | 8.740.000.000 | |
| | | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini | 81% | | | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan dan Deteksi Dini | 81% | | |
| | | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang | 81% | | | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang | 81% | | |
| B | Program Penguatan Ketahanan Bangsa | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa | 81% | 5.200.000.000 | Program Penguatan Ketahanan Bangsa | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa | 81% | 5.200.000.000 | |
| C | Program Penguatan Politik Dalam Negeri | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI | 81% | 9.725.000.000 | Program Penguatan Politik Dalam Negeri | Jawa Tengah | Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI | 81% | 9.725.000.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan yang berasal dari Hasil Reses :

**Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Usulan Reses)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN | | | | |
| 1. | Pendidikan dan pelatihan legal officer dan paralegal | Kota Semarang | Meningkatkan pengetahuan dalam kehidupan berbangsa | 218.350.000 | Dewan Pimpinan Pusat LSM Bina Bangsa Indonesia |
| 2. | Konferensi daerah, pelatihan kepemimpinan dan manajemen | Kota Semarang | Meningkatkan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | 328.165.000 | Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia (DPD WKRI) Jawa Tengah |
| 3. | Sosialisasi JSN'45, pembinaan, sarasehan dan Rakor | Kota Semarang | Mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia | 505.000.000 | Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah |
| 4. | Seminar, workshop, pelatihan dan pendidikan | Kota Semarang | Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi kekerasan, diskriminasi, korupsi dan manipulasi politik | 1.380.000.000 | Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah |
| 5. | Harlah muslimat NU, Bhakti sosial dan pembinaan organisasi | Kabupaten Tegal | Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa | 1.111.670.000 | Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (PC Muslimat NU Kabupaten Tegal) |
| 6. | Pelatihan dan workshop | Kota Semarang | Meningkatkan peran serta ormas secara utuh dan menyeluruh menuju jawa tengah lebih maju | 448.055.000 | Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Wanita Sejahtera (DPW GWS) Provinsi Jawa Tengah |
| 7. | Pembinaan, seminar dan pembekalan | Kabupaten | Meningkatkan cegah dan | 230.220.000 | Dewan Pimpinan Wilayah |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|-----------|---|----------------------|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Semarang | deteksi dini bahaya narkoba | | Barisan Anti Narkoba Nasional (DPW BANN) Provinsi Jawa Tengah |
| 8. | Seminar Moderasi Islam | Kota Semarang | Meningkatkan peran guru dalam pembangunan bangsa | 421.500.000 | Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Jawa Tengah |
| 9. | Dialog kebangsaan dan penguatan kelembagaan | Kota Semarang | Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa | 250.000.000 | Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah |
| 10. | Jambore pemuda lintas agama dan pengembangan kelembagaan | Kota Semarang | Mewujudkan bangsa indonesia yang harmonis dan damai | 500.000.000 | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah |
| 11. | Musypimwil, diklat, seminar dan pesantren kebangsaan | Kota Semarang | Meningkatkan kompetensi SDM | 3.340.940.186 | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah |
| 12. | Rakerda, Halaqah, FBD, Orientasi kader dan semiloka | Kota Semarang | Mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang dimiliki | 1.500.000.000 | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah |
| 13. | Rapat Kerja Daerah, HUT PEPABRI dan Pengembangan Kelembagaan | Kota Semarang | Menjaga stabilitas nasional | 129.600.000 | Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Provinsi Jawa Tengah |
| 14. | Rakerda, Rakorwil, FGD dan Diklat | Kota Semarang | Membina persatuan dan kesatuan bangsa dengan wawasan dan semangat kebangsaan | 483.840.000 | Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi Jawa Tengah |
| 15. | Pelatihan Kader Madya Taruna Melati, Pelatihan Advokasi, Seminar Kebangsaan dll | Kota Semarang | Membentuk kader yang mampu menyelesaikan problem-problem pelajar | 213.752.000 | Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah |
| 16. | Workshop, parade, pekan raya, lomba | Kota Semarang | Meningkatkan rasa cinta akan budaya dan karya Bangsa Indonesia | 310.000.000 | Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia |
| B. | HIBAH INSTANSI VERTIKAL | | | | |
| 1. | Kegiatan Peningkatan Wilayah untuk Lanud Jenderal Besar Soedirman | Kabupaten Purbalinga | Peningkatan keamanan | 188.000.000 | TNI AU Jenderal Besar Soedirman |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|-----------|--|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Tugas pokok fungsi Kepolisian dan pengadaan alat, pembangunan, renovasi dan lain-lain (Belanja Modal) | Kota Semarang | Peningkatan tupoksi kepolisian | 7.7765.316.050 | Kepolisian Daerah Jawa Tengah |
| 3. | Kegiatan pengamanan hari besar nasional/keagamaan, pengamanan agenda besar nasional (Pilpres,Pilkada), ground handling, pendaratan helly, dll | Kabupaten Tegal | Peningkatan keamanan | 320.000.000 | Satuan Radar 214 Tegal |
| 4. | Kegiatan peningkatan pengamanan wilayah Lanal Cilacap | Kabupaten Cilacap | Peningkatan keamanan | 300.000.000 | TNI AL Cilacap |
| 5. | Kegiatan Operasional di wilayah kerja Lanal Tegal | Kabupaten Tegal | Peningkatan operasioanal | 264.000.000 | TNI AL Tegal |
| 6. | Kegiatan peningkatan pengamanan tamu VIP dan VVIP khususnya pengamanan Ring 1 pada saat kunjungan keamanan di wilayah sekitar Lanud Adi Soemarmo | Kota Surakarta | Peningkatan keamanan | 500.000.000 | Lanud Adi Soemarmo |
| 7. | Kodal Pimpinan, Kegiatan Karya Bhakti TNI, Kegiatan Pengamanan Wilayah, Seradikalisasi Eks Napiter dll | Kota Semarang | Menciptakan kondisi wilayah yang stabil | 7.334.662.000 | Kodam IV/ Diponegoro |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015-2019 adalah: ***"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"***.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: visi terbentuknya sistem politik demokratis, dan kebudayaan masyarakat yang partisipatif.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tersebut adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakterbangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui hermonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah misi ke-1 yaitu: Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakterbangsa dan stabilitas dalam negeri.

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 yang sesuai adalah tujuan

nomor 1, yaitu: "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara", adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|-----------|---|---|---|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik | | A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik | Persen | 81 |
| | | a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa | 1. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa | Persen | 81 |
| | | b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik | 2. Persentase masyarakat yang paham terhadap politik | Persen | 81 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|---|----------|---|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 0 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00.01 | Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 5.575.000.000 | | 6.273.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 0.00.01.001 | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00. % | 231.000.000 | 12 Bulan | 231.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.002 | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00. % | 7.000.000 | 12 Bulan | 7.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.003 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00. % | 350.000.000 | 12 Bulan | 400.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.004 | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00. % | 80.000.000 | 12 Bulan | 80.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.005 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00. % | 1.730.000.000 | 12 Bulan | 2.100.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.006 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan | 100.00. % | 250.000.000 | 12 Bulan | 250.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | | Indikator Kinerja | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------------------|--------|------------|---|-----------|---|----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | Perangkat Daerah | | | | | | | | | dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | | keuangan perangkat daerah | | | | | | |
| 0.00.01.007 | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 90.000.000 | 12 Bulan | 90.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.008 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 25.000.000 | 12 Bulan | 25.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.009 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 900.000.000 | 12 Bulan | 1.030.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.010 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 300.000.000 | 12 Bulan | 300.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.011 | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | | | | | | | | | Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah | 1 Paket | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 612.000.000 | 1 Paket | 100.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.013 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan. | 5 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 125.000.000 | 2 Unit | 700.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.014 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | | | | | | | | | Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan. | 100 Unit | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 70.000.000 | 0 Unit | | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.015 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/B intek/Seminar | 240 Orang | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan | 100.00 % | 445.000.000 | 240 Orang | 600.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | | Indikator Kinerja | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------------------|--------|------------|---|-------------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | keuangan perangkat daerah | | | | | | |
| 0.00.01.016 | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah | 1 Laporan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 60.000.000 | 1 Laporan | 60.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.01.023 | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah | 12 Bulan | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100.00 % | 300.000.000 | 12 Bulan | 300.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT |
| 0.00.02 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 7.760.263.000 | | 6.750.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 0.00.02.001 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 10 Dokumen | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 100.00 % | 655.000.000 | 10 Dokumen | 600.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PROGRAM - SEKRETARIAT |
| 0.00.02.002 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 10 Dokumen | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 100.00 % | 705.000.000 | 10 Dokumen | 750.000 | OPD Provinsi; KOTA SEMARANG | SUB BAGIAN PROGRAM - SEKRETARIAT |
| 0.00.02.004 | Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan | 1700 Orang | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | 100.00 % | 1.900.000.000 | 1800 Orang | 1.500.000 | OPD Provinsi; PROVINSI LAIN | SUB BAGIAN PROGRAM - SEKRETARIAT |
| | | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa | 1000 Orang | | | 1.800.000.000 | 1100 Orang | 1.850.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri | 2500 Orang | | | 2.400.000.000 | 2000 Orang | 1.850.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol | 35 Kabupaten/Kota | | | 300.263.000 | 35 Kabupaten/ Kota | 200.000 | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|--|-------------|--|-----------|---------------------------|---------------------------|------------|---|--|
| | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.15 | Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan | | | | | | | | | | | | | 8.740.000.000 | | 10.250.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1.05.15.001 | Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | Jumlah laporan konflik sosial | 3 Laporan | Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial | 100.00. % | 800.000.000 | 3 Laporan | 500.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; SRAGEN; KOTA SURAKARTA; KUDUS; BREBES; BATANG; SEMARANG; KOTA SEMARANG; BANJARNEGARA; PEKALONGAN; PURBALINGGA; PEMALANG; PATI; JEPARA; KOTA TEGAL; KENDAL; SUKOHARJO; BANYUMAS; DEMAK; KOTA SALATIGA; KLATEN; GROBOGAN; TEGAL; KOTA PEKALONGAN; KARANGANYAR; BLORA; BOYOLALI; WONOSOBO; KEBUMEN; KOTA MAGELANG; CILACAP; REMBANG; PURWOREJO; MAGELANG; WONOGIRI; TEMANGGUNG | SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL - Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |
| | | | | | | | | | | Jumlah laporan konflik yang tertangani | 150 Laporan | | | 500.000.000 | 150 Laporan | 440.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. | 400 Orang | | | 650.000.000 | 500 Orang | 650.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial | 1 Paket | | | 215.000.000 | 1 Paket | 300.000 | | |
| 1.05.15.002 | Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini | | | | | | | | | Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu | 21 Kali | Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini | 81.00. % | 1.000.000.000 | 0 Kali | | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; GROBOGAN; WONOGIRI; PEMALANG; KLATEN; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN; SRAGEN; SEMARANG; WONOSOBO; SUKOHARJO; KOTA | SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL - Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | | Indikator Kinerja | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------------------|--------|------|---|------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|---|
| | | | | Uraian | Target | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | Rp. | Target | | |
| | | | | | Sat | Vol | Tolok Ukur | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SURAKARTA; REMBANG; KENDAL; KEBUMEN; BLORA; KOTA SEMARANG; PURBALINGGA; DEMAK; PEKALONGAN; BOYOLALI; PURWOREJO | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk | 1100 Orang | | | 500.000.000 | 1800 Orang | 1.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani | 20 Kali | | | 810.000.000 | 20 Kali | 1.310.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah laporan deteksi dini | 12 Kali | | | 450.000.000 | 12 Kali | 500.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah pantauan orang asing. | 6000 Orang | | | 325.000.000 | 6500 Orang | 500.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Unjuk rasa tertangani | 300 Kali | | | 200.000.000 | 350 Kali | 150.000 | | |
| 1.05.15.003 | Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | | | | | | | | | Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk | 450 Orang | Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang | 81.00% | 350.000.000 | 475 Orang | 635.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; SUKOHARJO; TEGAL; CILACAP; KUDUS; KOTA SALATIGA; KOTA SURAKARTA; BANYUMAS; REMBANG; PEMALANG; WONOSOBO | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN - Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk | 600 Orang | | | 520.000.000 | 635 Orang | 830.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk | 450 Orang | | | 390.000.000 | 475 Orang | 630.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila | 900 Orang | | | 630.000.000 | 1350 Orang | 1.375.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa | 1300 Orang | | | 900.000.000 | 1375 Orang | 1.430.000 | | |
| 1.05.16 | Program Penguatan Ketahanan Bangsa | | | | | | | | | | | | | 4.950.000.000 | | 7.110.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1.05.16.001 | Penguatan Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | | Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah | 7 Dokumen | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa | 81.00% | 605.000.000 | 8 Dokumen | 805.000 | Bidang Ketahanan Bangsa; KOTA MAGELANG; PEMALANG; KOTA PEKALONGAN; JEPARA; BANYUMAS; KUDUS; BANJARNEGARA; | SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI - Bidang Ketahanan Bangsa |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|--|-------------|--|--------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | KLATEN; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA; BREBES | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi | 20 Kelompok | | | 500.000.000 | 30 Kelompok | 1.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi | 70 Laporan | | | 345.000.000 | 70 Laporan | 315.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi | 1350 Orang | | | 900.000.000 | 1450 Orang | 1.400.000 | | |
| 1.05.16.002 | Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas | | | | | | | | | Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara | 240 Orang | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa | 81.00% | 173.000.000 | 240 Orang | 323.000 | Bidang Ketahanan Bangsa; PURBALINGGA; TEGAL; KLATEN; KOTA SALATIGA; WONOSOBO; BATANG; PATI; KOTA SURAKARTA; CILACAP; BLORA; SUKOHARJO; PURWOREJO | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN - Bidang Ketahanan Bangsa |
| | | | | | | | | | | Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah | 49 Kelompok | | | 180.000.000 | 55 Kelompok | 430.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya | 480 Orang | | | 390.000.000 | 400 Orang | 515.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis | 240 Orang | | | 210.000.000 | 320 Orang | 300.000 | | |
| 1.05.16.003 | Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas. | | | | | | | | | Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi | 240 Orang | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa | 81.00% | 449.000.000 | 240 Orang | 252.000 | Bidang Ketahanan Bangsa; KLATEN; PURBALINGGA; MAGELANG; KOTA SURAKARTA; KUDUS; REMBANG; KOTA TEGAL; WONOSOBO; KOTA PEKALONGAN; | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN - Bidang Ketahanan |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|--|------------|---|----------|---------------------------|---------------------------|------------|---|--|
| | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | JEPARA; PATI | Bangsa |
| | | | | | | | | | | Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan | 400 Orang | | | 650.000.000 | 400 Orang | 650.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan | 320 Orang | | | 548.000.000 | 420 Orang | 845.000 | | |
| 1.05.17 | Program Penguatan Politik Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | 8.975.000.000 | | 11.185.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1.05.17.001 | Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik | | | | | | | | | Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik | 500 Orang | Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI | 81.00.0% | 500.000.000 | 300 Orang | 485.171 | Bidang Politik Dalam Negeri; PURBALINGGA; DEMAK; GROBOGAN; SUKOHARJO; KENDAL; SEMARANG; KOTA SURAKARTA; KLATEN; WONOGIRI; WONOSOBO; PEMALANG; REMBANG; SRAGEN; KEBUMEN; KOTA MAGELANG; PEKALONGAN; BLORA; KOTA PEKALONGAN; KOTA SEMARANG; BOYOLALI; PURWOREJO | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri |
| | | | | | | | | | | Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada | 550 Orang | | | 1.200.000.000 | 600 Orang | 1.332.863 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 | 3200 Orang | | | 1.850.000.000 | 3200 Orang | 2.600.000 | | |

| Kode | Program dan Kegiatan Pembangunan | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah | | Indikator Kinerja | | | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2020 | Prakiraan Maju Tahun 2021 | | Lokasi | Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja |
|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|--|------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | Capaian Program | | | Keluaran | | Hasil | | | | Rp. | Target | | |
| | | | | Uraian | Target | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | |
| | | | | | Sat | Vol | | | | | Sat | Vol | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada | 600 Orang | | | 550.000.000 | 400 Orang | 512.966 | | |
| 1.05.17.002 | Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik | | | | | | | | | Hasil Pendataan Parpol | 35 Laporan | Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI | 81.00% | 150.000.000 | 35 Laporan | 200.000 | Bidang Politik Dalam Negeri; SRAGEN; KLATEN; KEBUMEN; PEMALANG; PEKALONGAN; WONOSOBO; PURBALINGGA; KOTA MAGELANG; PURWOREJO; REMBANG; BLORA; KOTA SURAKARTA; KOTA SEMARANG; KOTA PEKALONGAN; KENDAL; SUKOHARJO; GROBOGAN; SEMARANG; DEMAK; BOYOLALI; WONOGIRI | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK - Bidang Politik Dalam Negeri |
| | | | | | | | | | | Jumlah Fasilitas Forkopimda | 500 Orang | | | 2.250.000.000 | 500 Orang | 2.260.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik | 240 Orang | | | 182.000.000 | 80 Orang | 82.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Parpol yang terikat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol | 400 Orang | | | 432.000.000 | 400 Orang | 532.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik | 3300 Orang | | | 1.561.000.000 | 3300 Orang | 2.800.000 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah | 400 Orang | | | 300.000.000 | 400 Orang | 380.000 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 35.500.263.000 | | 41.568.000 | | | |

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya hingga kebawah dan keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, disusun sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kewajibannya dan merupakan dasar pijakan dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan kondisi wilayah Jawa Tengah dan dinamika kehidupan sosial politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih optimal, efisien dan akuntabel.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19591202 198203 1 005